



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi Unggul

SK BAN –PT NO: 2579 SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

***Peran Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu di Kab.
Sukabumi, Jawa Barat dalam Konservasi Satwa Liar di
Indonesia***

Skripsi

Oleh

Isyanti Rahamaya Eriyanto

6091801108

Bandung

2022



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi Unggul

SK BAN –PT NO: 2579 SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

***Peran Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu di Kab.
Sukabumi, Jawa Barat dalam Konservasi Satwa Liar di
Indonesia***

Skripsi

Oleh

Isyanti Rahamaya Eriyanto

6091801108

Pembimbing

Sylvia Yazid, Ph. D

Bandung

2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi


Nama : Isyanti Rahamaya Eriyanto
Nomor Pokok : 6091801108
Judul : Peran Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu di Kab. Sukabumi,
Jawa Barat dalam Konservasi Satwa Liar di Indonesia

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 4 Juli 2022
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

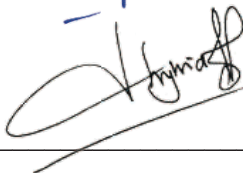
Ketua sidang merangkap anggota

Elisabeth A. Satya Dewi, Ph.D.

: 


Sekretaris

Sylvia Yazid, Ph.D

: 

Anggota

Mireille Marcia Karman, M.Litt.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Isyanti Rahamaya Eriyanto
NPM : 6091801108
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Peran Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu
di Kab. Sukabumi, Jawa Barat dalam Konservasi
Satwa Liar di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku, apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 14 Juni 2022

A handwritten signature in black ink is written over a pink QR code. The QR code is a square with a white border and contains a small logo of a Garuda bird. Below the QR code, there is a pink rectangular stamp with the text 'PERAI' and 'SEPUKUH RIBU RUPIAH'.

Isyanti Rahamaya Eriyanto

ABSTRAK

Nama : Isyanti Rahamaya Eriyanto
NPM : 6091801108
Judul : Peran Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu di Kab. Sukabumi, Jawa Barat dalam Konservasi Satwa Liar di Indonesia.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perlunya pengurangan ancaman terhadap satwa liar demi mengurangi angka kepunahan dan menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia. Dalam hal tersebut, Indonesia telah berkomitmen dengan cara menandatangani Konvensi CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*). Namun, implementasi dari konvensi tersebut belum berjalan secara optimal sehingga negara memerlukan partisipasi dari aktor non-pemerintah seperti Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu (YCKT). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai “Bagaimana peran YCKT di Kab. Sukabumi, Jawa Barat dalam melakukan konservasi satwa liar di Indonesia?”. Hal ini dapat ditinjau melalui metode kualitatif dengan cara menganalisis teori liberalisme sosiologis, konsep peran NGO dari Lewis dan Kanji, serta penggunaan *cobweb model* terhadap berbagai data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil analisis terhadap konsep peran NGO, ditemukan bahwa YCKT memiliki peran paling dominan sebagai *partner* dan *implementer* yang diupayakan melalui kerja sama dengan berbagai aktor transnasional serta upaya *service delivery* dalam memobilisasi sumber daya melalui upaya konservasi dalam mekanisme penyelamatan, rehabilitasi dan pelepasliaran satwa liar. Namun YCKT masih dapat lebih meningkatkan perannya sebagai *catalyst* terutama melalui upaya advokasi. Adapun peran YCKT dapat terwujud karena adanya dukungan dari berbagai aktor transnasional seperti Wanicare Foundation di Belanda, Chester Zoo di Inggris, Mandai Wildlife Reserves di Singapura dan berbagai aktor transnasional lainnya serta berbagai unit kerja dalam yayasan tersebut seperti *Wildlife Rescue Center*, *Wildlife Learning Center*, dan *Conservation and Breeding Center*.

Kata kunci: konservasi satwa liar, keanekaragaman hayati, CITES, NGO, transnasionalisme.

ABSTRACT

Nama : Isyanti Rahamaya Eriyanto
NPM : 6091801108
Judul : *The Role of Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu in Kab. Sukabumi, Jawa Barat in Conserving Wildlife in Indonesia.*

This research is motivated by the need to reduce threats to wildlife in order to lower extinction rates and maintain biodiversity in Indonesia. In this regard, the Indonesian government has signed the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). However, the implementation of the convention has not run optimally so that the state requires the participation of non-government actors such as the Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu (YCKT). This study aims to answer the question of “What is the role of YCKT in Kab. Sukabumi, West Java in conserving wildlife in Indonesia?”. This can be reviewed through qualitative methods by analyzing the theory of sociological liberalism, the concept of the role of NGOs from Lewis and Kanji, and the use of the cobweb model on various primary and secondary data. Based on the results of an analysis of the concept of the role of NGOs, it was found that YCKT has the most dominant role as a partner and implementer which is pursued through collaboration with various transnational actors and service delivery efforts in mobilizing resources through conservation efforts in the mechanism of rescuing, rehabilitating and releasing wild animals. However, YCKT can still further enhance its role as a catalyst, especially through advocacy efforts. The role of YCKT can be realized because of the support from various transnational actors such as the Wanicare Foundation in the Netherlands, Chester Zoo in England, Mandai Wildlife Reserves in Singapore and various other transnational actors as well as various work units within the foundation such as the Cikananga Wildlife Rescue Center, Cikananga Wildlife Learning Center, and Cikananga

Keywords: Wildlife conservation, biodiversity, CITES, NGO, Transnationalism.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa melalui izinnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Dibimbing oleh Sylvia Yazid, Ph.D. selaku dosen pembimbing penulis, akhirnya penelitian dengan judul “Peran Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu di Kab. Sukabumi, Jawa Barat dalam Konservasi Satwa Liar di Indonesia” dapat selesai dengan baik. Penelitian ini kemudian menjelaskan secara lebih jauh permasalahan perlindungan satwa di Indonesia melalui upaya konservasi. Penelitian juga membahas bagaimana peran Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu (YCKT) sebagai organisasi non-pemerintah yang mengupayakan konservasi satwa liar demi pelestarian keanekaragaman hayati melalui tiga peran utama sebagai *implementer*, *catalyst*, dan *partner*.

Akhirnya, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada setiap pihak yang terlibat pada proses penelitian baik sebagai pembimbing, teman diskusi, penyemangat, dan terutama setiap pihak yang bersedia meluangkan waktu untuk wawancara yang dimanfaatkan sebagai data dalam penelitian. Meski demikian, penulis yakin bahwa masih banyak kekurangan dan perbaikan yang seharusnya dapat ditingkatkan untuk membuat penulisan skripsi ini dengan baik. Karena itu, penulis sangat terbuka pada setiap saran dan perbaikan yang dapat meningkatkan kualitas penelitian ini.

Bandung, 14 Juni 2022

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menjalani masa studi hingga penyusunan tugas akhir, banyak pihak yang saya rasa sangat berperan dalam memberikan dukungan bagi saya pribadi. Bahkan bisa saja ditulis sebuah skripsi untuk membahas peran kawan dan keluarga dalam selesainya masa perkuliahan diri ini. Rasa syukur dan terima kasih saya panjatkan untuk kalian semua!

Untuk Tuhanku

Tanpa kehendak dan izin Mu aku tidak akan melalui perjalanan perkuliahan yang luar biasa menyenangkan dan penuh cerita dan pembelajaran. Terima kasih atas segala berkah dan tantangan yang telah Engkau berikan kepada diri ini untuk terus belajar dan bersyukur.

Untuk Keluarga

Terima kasih mama Isty sudah menjadi investor tetap dalam kehidupanku hingga saat ini. Terima kasih banyak atas segala doa, kasih sayang dan usaha yang dikerahkan agar diri ini dapat melanjutkan studi hingga jenjang pendidikan tinggi. Untuk adikku Indira alias *kang dede*, terima kasih sudah menjadi sahabat yang selalu ada dalam rencana-rencana dan proses kehidupanku yang penuh dinamika.

Untuk Mbak Syl

Terima kasih kepada Mbak Syl yang telah bersedia menjadi dosen pembimbing untuk skripsi ini. Juga beribu terima kasih atas perhatian yang diberikan dalam proses pembelajaran di kelas, proyek penelitian buruh migran, dan IISMA. Sehat selalu bagi Mbak dan Keluarga, serta lancar untuk proyek-proyeknya Mbak.

Untuk YCKT

Mengingat tidak adanya penelitian sebelumnya mengenai YCKT dari sudut pandang Hubungan Internasional, peneliti sangat berterima kasih atas keterbukaan pihak YCKT untuk memberikan data-data yang sangat bermanfaat bagi skripsi ini serta perkembangan ilmu ini. Semoga YCKT dapat terus mengupayakan pelestarian lingkungan melalui konservasi satwa liar.

Untuk Tim Sukses Skripsi

Naomi, Rizky, Jeanette, Jamie kalian luar biasaaaaaaa. Sukses terus kedepannya! Sepertinya tanpa dukungan dan bantuan kalian aku tidak akan berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan percaya diri dan baik.

Untuk FOOZ

FOOZ, sebuah titik awal yang menginspirasi hadirnya skripsi ini. Terima kasih banyak Kak Ganthar, Lula, Zoldi, Naomi, Audrey, Laras, Irty serta kawan-kawan lainnya yang turut antusias dalam isu mengenai konservasi. Besar harapanku untuk keberlanjutan FOOZ menjadi sesuatu yang lebih besar dan berdampak.

Untuk IFL Team UNDP Indonesia

Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan, senang rasanya dapat menjadi bagian dari keluarga IFL UNDP. Juga beribu terima kasih atas pengertiannya bahwa saya sedang mengerjakan skripsi sehingga diberikan waktu untuk bernafas dan menyelesaikan tugas akhir kuliah ini dengan baik.

Untuk Keluarga Besar Kabaret dan Warta Himahi

Perjalanan kuliah tidak begitu berkesan tanpa pengalaman yang diberikan oleh kedua unit ini. Terima kasih atas tawa canda, keringat dan segala yang diberikan.

Untuk Teman Berpesta, serta HI 2018

Mengenang masa awal dan akhir perkuliahan. Dibuka oleh pesta, ditutup oleh pesta.

Terima kasih atas memori baiknya, hidup terus Buku, Pesta dan Cinta untuk FISIP.

Terima kasih sudah mengisi suatu bagian dalam kehidupanku, semoga kita semua sukses bersama dalam cita dan cinta.

Untuk Cekes Klub

Sejak masa SMA hingga saat ini kalian adalah tempat bercerita dan berkeluh kesah.

Meski kini kita sudah berjauhan, semoga koneksi terus terjaga ya! Sehat-sehat Vina, Sannia, Zalfa, Giva.

Untuk Keluarga Besar *Two Hands Full* dan *Peels Records*

Perjalanan dimulai ketika melihat pengumuman lowongan pekerjaan sebagai *barista* di THF yang diunggah oleh Reiva pada grup HI angkatan 2018. Terima kasih Rei, berkatmu aku bertemu banyak kawan baru yang menyenangkan dan ku sayangi. Terima kasih atas kopi-kopi yang esensial bagi pembuatan skripsi, tempat yang nyaman untuk mengerjakan skripsi, serta kawan kawan baik yang menyenangkan untuk diajak bermain! Terima kasih Jeremy, Gaius, Lucky, Munir, Regi, David, dkk.

Untuk Diri

Jangan berhenti bersyukur dan berusaha, Isyanti. Hidup hanya sekali maka manfaatkan sebaik mungkin, hidupmu menyenangkan loh! Jangan lupa juga bahwa kamu itu sangat beruntung.

Daftar Isi

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.2.1. Deskripsi Masalah.....	6
1.2.2. Pembatasan Masalah	12
1.2.3. Perumusan Masalah	13
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1.3.1. Tujuan Penelitian	13
1.3.2. Kegunaan Penelitian	13
1.4. Kajian Literatur	14
1.5. Kerangka Pemikiran	19
1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	23
1.6.1. Metode Penelitian	23
1.6.2. Jenis Penelitian.....	24

1.6.3.	Teknik Pengumpulan Data.....	25
1.7.	Sistematika Pembahasan	25
BAB II		27
2.1	Rezim Internasional yang Meregulasi Perlindungan Satwa Liar	28
2.1.1	<i>International Union for Conservation of Nature</i>	28
2.1.2	<i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i>	29
2.2	Pentingnya Perlindungan dan Konservasi Satwa Liar	31
2.2.2	Manfaat Konservasi Satwa Liar Serta Dampak Kepunahan Satwa	33
2.3	Kebijakan Nasional dan Pemangku Kepentingan Perlindungan Satwa Liar di Indonesia	35
2.3.1	Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perlindungan Satwa Liar di Indonesia	35
2.3.2	Pemangku Kepentingan dalam Kebijakan Perlindungan Satwa Liar di Indonesia	37
2.4	Mekanisme Perlindungan Satwa Liar di Indonesia melalui <i>Rescue, Rehabilitate, Release</i>	39
2.5	Permasalahan Perlindungan Satwa Liar di Indonesia	42
2.5.1	Permasalahan Alih Fungsi Habitat dan Konflik Satwa Liar – Manusia	43
2.5.2	Permasalahan Perburuan dan Perdagangan Ilegal dalam Perlindungan Satwa Liar di Indonesia	44

2.5.3	Permasalahan Kesadaran Masyarakat dalam Perlindungan Satwa Liar di Indonesia	45
2.5.4	Bukan Isu Strategis dalam Sektor Prioritas Pembangunan Nasional Indonesia	46
2.5.5	Permasalahan Kompleksitas Pemangku Kepentingan Terkait Perlindungan Satwa Liar di Indonesia.....	48
2.5.6	Permasalahan Keterbatasan Peran Negara dalam Sistem Perlindungan Satwa Liar di Indonesia	49
BAB III		51
3.1.	Latar Belakang Pendirian Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu	51
3.2.	Profil Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu	53
3.2.1.	Visi dan Misi Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu	53
3.2.2.	Sumber Pendanaan Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu	55
3.2.3.	Struktur Organisasi Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu	58
3.2.4.	Unit dan Program Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu	59
3.2.4.1.	<i>Wildlife Rescue Center</i>	59
3.2.4.2.	<i>Cikananga Conservation Breeding Centre</i>	61
3.2.4.3.	<i>Wildlife Learning Center</i>	62
BAB IV		65
4.1	Memahami Upaya Konservasi Sebagai Peran <i>Implementer</i>	66
4.2	Memahami Inovasi dalam Membawa Perubahan Sebagai Peran <i>Catalyst</i>	78

4.3 Memahami Pendanaan dan Kerja Sama Internasional Melalui Peran sebagai <i>Partner</i> dan Model <i>Cobweb</i>	85
BAB V	105
Lampiran 1: DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	115

Daftar Tabel dan Gambar

Tabel 4.1 Satwa yang dititiprawatkan kepada YCKT 2020-Maret 2022	71
Tabel 4.2 Pendapatan YCKT pada tahun 2020.....	90
Tabel 4.3 Sumber dan Jumlah Pendapatan untuk Proyek Infrastruktur di YCKT.....	92
Gambar 2.1 Mekanisme Konservasi Satwa Liar di Indonesia.....	40
Gambar 3.1 Struktur Organisasi YCKT.....	58
Gambar 4.1 Cobweb Model YCKT.....	97

DAFTAR SINGKATAN

- BKSDA : Balai Konservasi Sumber Daya Alam
- CCBC : *Cikananga Conservation Breeding Center*
- CITES : *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*
- Ditjen KSDAE: Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
- IUCN : *International Union for Conservation of Nature*
- LK : Lembaga Konservasi
- NGO : *Non-Governmental Organization*
- PPS : Pusat Penyelamatan Satwa
- PRS : Pusat Rehabilitasi Satwa
- TSL : Tanaman dan Satwa Liar
- WRC : *Wildlife Rescue Center*
- YCKT : Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perlindungan satwa liar merupakan sebuah isu yang diperhatikan secara internasional. Permasalahan kepunahan spesies, perdagangan satwa ilegal, perburuan liar, konflik satwa dengan manusia telah menjadi beberapa permasalahan yang membuat dunia internasional khawatir tentang dampaknya terhadap keberlangsungan hidup manusia di dalam sebuah lingkungan biologis yang berperan untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia itu sendiri dalam jangka panjang.

Salah satu bentuk perhatian internasional diwujudkan dengan adanya konvensi yang berupaya untuk melindungi satwa liar yaitu CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) dari salah satu ancaman utama yaitu perdagangan satwa liar ilegal. Negara peratifikasi CITES memiliki kewajiban untuk patuh dan mengimplementasikan poin-poin perjanjian tersebut. Dalam artian, setiap negara berkewajiban untuk mengupayakan perlindungan demi mencegah kepunahan yang terjadi akibat dampak buruk perdagangan satwa dan tumbuhan ilegal agar pelestarian satwa dan tumbuhan dapat tercapai. Hal ini membuat perlindungan satwa menjadi hal penting yang patut diperjuangkan. CITES bekerja dengan mengkategorisasikan dan mengontrol spesies yang diperdagangkan secara internasional melalui tiga appendiks yang telah ditentukan. Semua impor dan ekspor spesies yang tercakup

dalam konvensi harus disahkan melalui sebuah mekanisme atau sistem perizinan. Setiap negara peratifikasi konvensi harus menunjuk satu atau lebih Otoritas Manajemen yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem perizinan tersebut dan satu atau lebih Otoritas Ilmiah atau keilmuan untuk membuat rekomendasi penentuan spesies tumbuhan dan satwa yang dibahas dalam konferensi untuk menentukan kategorisasi apendiks bagi tiap spesies.¹ Selain itu pemerintah Indonesia pun telah menerapkan berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka menegakan konvensi CITES.

Kepunahan dapat didefinisikan sebagai hilangnya spesies tertentu dalam entitas biologi sehingga mengakibatkan ancaman terhadap spesies tersebut maupun spesies lain yang mengakibatkan terganggunya kestabilan sebuah ekosistem. Kepunahan diakibatkan oleh berbagai faktor seperti kekuatan lingkungan (fragmentasi habitat, perubahan global, bencana alam, eksploitasi spesies yang berlebihan untuk kepentingan penggunaan oleh manusia) atau karena perubahan evolusioner dalam spesies tersebut (perkawinan sedarah genetik, reproduksi yang buruk, penurunan jumlah populasi).² Namun kepunahan yang paling umum terjadi adalah kepunahan karena ulah dan akibat manusia. Contohnya melalui hilangnya habitat alami bagi berbagai spesies akibat alih fungsi habitat menjadi lahan perkebunan.

¹ "How Cites Works," *CITES*, diakses 19 April 2022, <https://cites.org/eng/disc/how.php#:~:text=CITES%20works%20by%20subjecting%20international,authorized%20through%20a%20licensing%20system>.

² "Extinction," *Encyclopædia Britannica* (Encyclopædia Britannica, inc.), diakses 3 Juni 2022, <https://www.britannica.com/science/extinction-biology>.

Manusia bergantung erat pada sumber daya yang telah disediakan oleh bumi selama jutaan tahun, sumber daya tersebut termasuk satwa dan tumbuhan. Namun ketergantungan manusia terhadap satwa dan tumbuhan berujung pada eksploitasi berlebih sehingga mengancam keberlangsungan hidup atau kepunahan suatu spesies. Spesies yang ada dalam suatu wilayah tertentu menjadi perhatian bagi banyak orang, tidak hanya orang dari wilayah tempat spesies itu berada. Hal ini terjadi karena setiap spesies memiliki peranannya masing-masing di dalam sebuah ekosistem. Ketika sebuah ekosistem di suatu negara atau wilayah mengalami kerusakan, cepat atau lambat ekosistem di negara atau wilayah lain pun terkena dampaknya karena kehidupan biologis memiliki keterhubungan antara satu dengan yang lainnya yang tidak dapat dilihat secara kasat mata, keterhubungan itulah yang mewujudkan keseimbangan ekosistem. Maka dari itu permasalahan mengenai kepunahan merupakan permasalahan lingkungan dalam lingkup negara, regional maupun global dikarenakan koneksi dan keterhubungan komponen alam yang tidak mengenal batas-batas negara. Hal ini membawa perhatian internasional dalam berbagai isu eksploitasi lingkungan, ketika ada deforestasi besar-besaran yang melibatkan kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan, asapnya pun terbawa hingga Malaysia dan Singapura. Alam merupakan suatu kesatuan yang terkoneksi tanpa mengenal perbatasan teritori negara, maka dari itu permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang perlu diatasi dalam level global, regional, nasional, hingga ke tingkat individu.

Deforestasi, perburuan liar, perdagangan satwa dan tumbuhan ilegal, pembukaan lahan besar-besaran, degradasi lingkungan, eksploitasi alam merupakan contoh aktivitas manusia yang menyebabkan kepunahan spesies tumbuhan maupun satwa. Menurut sebuah penelitian sekitar 18% megafauna laut dapat punah pada abad berikutnya dan itu berdampak pada pengurangan kekayaan fungsional ekosistem dunia hingga 11%. Jika semua spesies terancam tadi benar-benar punah, maka kekayaan fungsional bumi akan menurun hingga 48%.³ Dari contoh penelitian tersebut, ancaman terbesar pada megafauna laut adalah akibat perilaku manusia yaitu penangkapan dan perubahan iklim yang juga secara tidak langsung disebabkan oleh manusia. Menurut *Living Planet Report 2018*, ancaman terbesar bagi berbagai spesies berkaitan dengan aktivitas manusia. Kita telah melihat penurunan sebesar 60% dalam populasi mamalia, burung-burungan, ikan, reptil, dan amfibi dalam kurun waktu 40 tahun.⁴

Ancaman kepunahan bagi satwa dan tumbuhan menyebabkan negara membentuk berbagai regulasi untuk memitigasi ancaman-ancaman tersebut. Selain negara, organisasi internasional dan dunia internasional pun turut peduli terhadap kekayaan alam tumbuhan dan satwa yang dibuktikan oleh berbagai macam konvensi internasional termasuk CITES yang diinisiasi oleh

³ Gita Laras Widyaningrum, "Terancam, Megafauna Laut Benar-Benar Bisa Punah Pada Seabad Mendatang," *National Geographic*, 21 April 2020, diakses 19 April 2022, <https://nationalgeographic.grid.id/read/132114152/terancam-megafauna-laut-benar-benar-bisa-punah-pada-seabad-mendatang>.

⁴ "Wildlife Conservation," *WWF*, World Wildlife Fund, diakses 19 April, 2022, <https://www.worldwildlife.org/initiatives/wildlife-conservation#:~:text=What%20WWF%20Is%20Doing,-%C2%A9%20J%C3%BCrgen%20Freund&text=Conserving%20wildlife%20is%20at%20heart,illegal%20trade%20and%20habitat%20loss>.

International Union for Conservation of Nature (IUCN). IUCN yang didirikan pada tahun 1948 merupakan persatuan demokratis (*democratic union*) yang menyatukan berbagai aktor pemerintahan dan organisasi masyarakat dalam isu konservasi. IUCN mencakup lebih dari 1400 organisasi dan 18000 pakar yang bersatu dalam upaya bersama melestarikan alam dan mempercepat transisi menuju pembangunan berkelanjutan.⁵ untuk merespon isu ancaman kepunahan satwa dan tumbuhan akibat berbagai ancaman yang dihadapinya. Negara-negara berkumpul dan menyetujui aturan CITES dengan cara memantau, mengatur, melindungi atau melarang perdagangan internasional yang mengancam ekosistem tumbuhan dan satwa.⁶ IUCN juga memiliki berbagai kerangka yang dijadikan standar prosedur dan acuan bagi berbagai praktisi konservasi di seluruh dunia.

Selain itu muncul aktor transnasional dalam bentuk organisasi seperti IUCN, *Wildlife Conservation Society (WCS)*, *World Wide Fund for Nature (WWF)*, dan berbagai organisasi non-pemerintah yang beroperasi secara lokal di Indonesia seperti YCKT yang memperhatikan fokus organisasinya terhadap isu konservasi satwa liar di dalam skala Indonesia. YCKT merupakan sebuah NGO dengan jejaring internasional yang berusaha melakukan konservasi satwa liar demi pelestarian lingkungan melalui berbagai unit kerja seperti *wildlife rescue center*, *conservation breeding center*, dan *wildlife learning center*. YCKT telah melakukan upaya konservasi sejak tahun 2001 dan memiliki

⁵ “About,” *IUCN*, 4 Februari 2022, diakses 19 April, <https://www.iucn.org/about/>.

⁶ “What Is CITES?,” *CITES*, diakses 19 April 2022, <https://cites.org/eng/disc/what.php>.

kontribusi yang besar terhadap dalam mendukung penegakan hukum pemerintah Indonesia dan CITES dalam upaya melindungi satwa liar dari berbagai ancaman kepunahan terutama perdagangan dan perburuan ilegal. Aktivitas manusia membuat tekanan yang sangat besar kepada alam, namun manusia juga lah yang memiliki kuasa untuk mengubah kondisi dan meringankan tekanan tersebut. Jika dilakukan bersama-sama, kita dapat mencegah dan memitigasi berbagai ancaman bagi kehidupan di planet bumi serta melindungi sumber daya alam yang mendukung dan menginspirasi kita.⁷ Maka diperlukan berbagai upaya untuk membahas pengurangan ancaman terhadap satwa liar baik di tingkat nasional maupun internasional melalui berbagai aktor transnasional terutama aktor non-pemerintah seperti YCKT.

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1. Deskripsi Masalah

Konservasi satwa membutuhkan keterlibatan aktor transnasional termasuk aktor negara dan terutama aktor non-negara seperti organisasi internasional, individu, perusahaan multinasional, akademisi, dan lain-lain demi mengisi keterbatasan peran negara. Ada banyak pihak yang terlibat dalam proses konservasi satwa, dan juga diperlukan keterlibatan banyak pihak untuk bisa meningkatkan kesadaran terkait isu satwa liar. Maka dari itu YCKT hadir sebagai aktor non-

⁷ “About Us,” *WWF* (World Wildlife Fund), diakses 19 April 2022, <https://www.worldwildlife.org/about/>.

pemerintah dan aktor transnasional yang berusaha mendukung pemerintah Indonesia dalam mengisi keterbatasan peran pemerintah dalam otoritas manajemen serta penegakan perlindungan bagi satwa liar demi pengurangan ancaman kepunahan bagi spesies sembari mengimplementasikan CITES.

Setiap negara di dunia memiliki ekosistem satwanya masing-masing yang berperan untuk dijadikan sumber kehidupan, baik melalui konsumsi hingga sektor turisme. Namun tiap negara sudah pasti memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang berbeda satu dengan lainnya, tergantung dengan lokasi geografis negara dan juga upaya konservasi yang telah dikerahkan. Indonesia misalnya, merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Menurut situs berita lingkungan Mongabay, Indonesia termasuk dalam peringkat ketiga negara dengan tingkat keanekaragaman hayati paling tinggi setelah Brazil dan Kolombia. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki ekosistem darat dan laut yang sangat beragam. Termasuk hutan hujan terbesar ketiga di dunia. Indonesia juga merupakan negara yang memiliki spesies mamalia paling banyak di dunia. Indonesia merupakan satu-satunya negara dimana badak, orangutan, gajah, beruang dan harimau masih bisa ditemukan tinggal di dalam hutan yang sama.⁸ Indonesia adalah rumah bagi 12% mamalia dunia (515 Spesies), 16% reptil dunia (781 spesies), 17% burung dunia (1592 spesies). Maka

⁸ Rhett A. Buttler, "The Top 10 Most Biodiverse Countries," *Mongabay Environmental News*, 20 Januari 2022, diakses 19 April 2022, <https://news.mongabay.com/2016/05/top-10-biodiverse-countries/>.

dari itu tidak heran bahwa *Conservation International* menyebut Indonesia sebagai negara *Megadiverse*.

Namun status Indonesia sebagai negara *Megadiverse* mendapatkan berbagai ancaman karena banyak spesies satwa yang terancam punah. Menurut IUCN, satwa terancam yang ada di Indonesia mencakup 184 mamalia, 119 burung, 32 reptil, 32 amfibi, dan 140 ikan. Ada 68 spesies yang termasuk ke dalam kategori *critically endangered*, 69 spesies dalam kategori *endangered*, dan 517 dalam kategori *vulnerable species*.⁹ Dalam IUCN Red List of Threatened Species, Indonesia disebut pula sebagai salah satu negara yang memiliki ancaman kepunahan mamalia terbesar yakni 147 spesies mamalia.¹⁰

Salah satu faktor penyebab kepunahan adalah perdagangan ilegal yang dilakukan masyarakat. Maka dari itu, Indonesia telah meratifikasi perjanjian internasional CITES yang mengharuskan negara untuk berkomitmen demi meregulasi perdagangan satwa agar tidak mengancam keselamatan atau keberlanjutan hidup sebuah spesies. CITES diinisiasi oleh IUCN pada pertemuan ke-7 di Polandia pada tahun 1960.¹¹ Perjanjian internasional ini telah diratifikasi oleh lebih dari 100 negara dan mengikat secara legal bagi seluruh negara yang meratifikasi (*legally binding on the Parties*). Namun meskipun CITES mengikat secara legal, tidak berarti konvensi ini menggantikan hukum nasional karena negara

⁹ PROFAUNA Indonesia, "Facts about Indonesian Wildlife," *PROFAUNA Indonesia*, diakses 20 April 2022, <https://www.profauna.net/en/facts-about-indonesian-animals#.YosKCS0RppQ>.

¹⁰ Josip Ivanovic, "Endangered Species in Indonesia," *Australian Science* (Australian Science, September 17, 2015), 170 September 2015, diakses 20 April 2022, <http://ozscience.com/environmental-science/endangered-species-in-indonesia/>.

¹¹ Wahyadyatmika Permana Adi, Reni Windiani, dan Nadia Farabi, 2017, Op.cit.

tetap menjadi otoritas tertinggi. Melainkan konvensi ini memberi kerangka kerja yang harus diterapkan oleh masing-masing negara, yang harus mengadopsi undang-undang domestiknya sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan, untuk memastikan bahwa CITES diterapkan di tingkat nasional.¹² Indonesia sebagai negara peratifikasi CITES telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan pelaksana yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, serta peraturan pelaksana lain seperti Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Pengawetan dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.¹³ Komponen-komponen tersebut merupakan perwujudan komitmen negara dalam pelaksanaan CITES pada tingkat nasional.

Pada tingkat nasional, CITES telah membuat pemerintah Indonesia untuk menggunakan peran Direktorat Jenderal Konservasi Keanekaragaman Hayati (Ditjen KSDAE) untuk koordinasi dan penegakannya. Beserta sejumlah lembaga lain seperti bea-cukai, karantina, kepolisian dan lembaga lainnya. Selain itu, pemerintah telah membentuk institusi khusus seperti yang telah diminta oleh CITES untuk menunjuk otoritas manajemen (*management authority*) dan otoritas keilmuan (*scientific authority*). Otoritas manajemen bertugas untuk menyelenggarakan legislasi, penegakan hukum penerbitan izin, laporan tahunan,

¹² CITES, Op.cit.

¹³ Wahyadyatmika Permana Adi, Reni Windiani, dan Nadia Farabi, "Implementasi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) Dalam Menangani Perdagangan Kukang Ilegal Di Indonesia," *Journal International Relations Universitas Diponegoro* 3, no. 4 (2017): 21-31, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/17576>.

serta komunikasi dengan institusi CITES lainnya.¹⁴ Pihak yang bertanggungjawab sebagai otoritas manajemen adalah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem atau Ditjen KSDAE, di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (KLHK). Sementara otoritas keilmuan bertugas untuk memberikan sarana kepada otoritas manajemen mengenai *non-detriment findings* dan aspek-aspek ilmiah lainnya mengenai implementasi dan pemantauan perdagangan internasional.¹⁵ Lembaga yang bertugas untuk menjadi otoritas keilmuan adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Selain itu KSDAE dan LIPI turut dibantu oleh berbagai *stakeholder* lain seperti PPNS bidang kehutanan, Balai Besar KSDA, Direktorat Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, Kepolisian, Kejaksaan dan organisasi non pemerintah. Maka dari itu, kita dapat melihat bahwa pemerintah tidak dapat menjalankan CITES dan mengupayakan konservasi tanpa bantuan organisasi non-pemerintah .

Banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat dalam konservasi tidak berarti mempermudah atau memperlancar upaya konservasi maupun mengeliminasi perdagangan ilegal. Bahkan menurut WCS, Indonesia merupakan *supplier* produk *wildlife* terbesar di Asia baik melalui jalur legal maupun ilegal. Nominal perdagangan satwa ilegal diestimasikan senilai \$1 milyar per tahun.¹⁶ Selain itu menurut Hariyawan A. Wahyudi selaku Dewan Pembina *Biodiversity Society*, “Kerugian negara akibat perdagangan satwa liar mencapai Rp13 triliun setiap

¹⁴ Wahyadyatmika Permana Adi, Reni Windiani, dan Nadia Farabi, 2017, Op.cit.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Tom Clements, “Wildlife Trade in Indonesia,” *Wildlife Conservation Society*, 11 Juli, 2016, diakses 20 April 2022, <https://global.wcs.org/Resources/Publications/Publications-Search-II/ctl/view/mid/13340/pubid/DMX3187500000.aspx>.

tahunnya. Itu berdasarkan data penelusuran Pusat Penelusuran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Bahkan kemungkinan nilainya lebih besar lagi,”¹⁷

Meskipun Indonesia telah menunjuk berbagai otoritas yang bertanggung jawab, ancaman terhadap satwa liar tetap marak ditemukan di sekitar kita. Hal ini terjadi karena berbagai faktor seperti rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya edukasi mengenai satwa liar, lemahnya penegakan hukum, alih fungsi habitat natural, dan lain-lain. Selain itu, negara belum memiliki kemampuan manajerial dalam konservasi yang inklusif hingga tahap perilisan kembali satwa ke habitat naturalnya paska sebuah tindakan ilegal atau konflik. Peran negara secara praktis berhenti sampai instrumen penyitaan satwa lalu menyerahkannya langsung kepada organisasi non-pemerintah seperti YCKT dengan status lembaga konservasi Pusat Penyelamatan Satwa untuk merawat satwa hasil sitaan aparat dan bertanggungjawab untuk melepasliarkan kembali satwa yang berada di dalam rawatannya. Maka dari itu, peran organisasi ini sangat krusial dalam upaya konservasi dan implementasi CITES.

Indonesia belum bisa sepenuhnya patuh (*comply*) terhadap CITES karena ada keterbatasan peran negara dalam merawat satwa sitaan negara. Maka organisasi non-pemerintah masuk di dalam keterbatasan ini dan berusaha untuk mewujudkan upaya konservasi yang optimal dengan berupaya untuk melakukan *rescue*, *rehabilitate*, dan *release*. Meskipun Indonesia telah meratifikasi CITES,

¹⁷ L Darmawan, “Perdagangan Satwa Liar Ilegal Capai RP13 Triliun, Apa Yang Bisa Diupayakan?,” *Mongabay.co.id*, 7 November 2019, diakses 20 April 2022, <https://www.mongabay.co.id/2019/11/05/perdagangan-satwa-liar-ilegal-capai-rp13-triliun-apa-yang-bisa-diupayakan/>.

perdagangan satwa ilegal masih kerap ditemukan. Hal ini terjadi karena sistem dan implementasi CITES yang dibuat secara domestik belum dijalankan secara optimal. Belum ada sinergi antar lembaga yang efektif dan tepat sasaran. Kesadaran masyarakat juga masih merupakan masalah yang besar bagi isu konservasi. Isu lingkungan tidak dianggap sebagai kepentingan nasional bagi banyak negara yang masih berkembang khususnya dalam kasus ini pemerintahan Indonesia. Sehingga Indonesia sangat membutuhkan peran organisasi non-pemerintah dan juga dukungan atau perhatian internasional aktor transnasional lainnya demi mengatasi permasalahan.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada peran YCKT sebagai organisasi non-pemerintah di Kab. Sukabumi, Jawa Barat dalam melakukan konservasi satwa liar demi mengurangi perdagangan ilegal satwa dan ancaman kepunahan terhadap spesies. YCKT dipilih sebagai NGO yang diteliti karena perannya sebagai Pusat Penyelamatan Satwa dan *Breeding Center* multispecies paling besar di Pulau Jawa. Upaya konservasi ini pun merupakan salah satu bentuk implementasi CITES yang dijalankan berdasarkan kerangka IUCN. Penelitian ini tidak difokuskan kepada jangka waktu tertentu, melainkan penelitian lebih dibatasi oleh cakupan dari isu konservasi satwa liar di Indonesia dan secara spesifik melihat peran YCKT sejak pendiriannya di tahun 2001 hingga saat ini di tahun 2022 terhadap sistem perlindungan nasional dalam rangka lokalisasi perjanjian internasional CITES. Hal ini dikarenakan CITES sebagai elemen penting dari penelitian ini, telah disadari

dan dijadikan acuan operasional YCKT sejak pendiriannya di tahun 2001 sehingga pembatasan dari penelitian merupakan cakupan dari isu yang dibahas.

1.2.3. Perumusan Masalah

Setelah menentukan fokus penelitian melalui latar belakang masalah, identifikasi masalah, serta pembatasan masalah, maka dirumuskan pertanyaan penelitian: “Bagaimana peran Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu di Kab. Sukabumi, Jawa Barat dalam melakukan konservasi satwa liar di Indonesia?”

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mendeskripsikan peran YCKT sebagai NGO asal Indonesia dalam pelaksanaan konservasi satwa liar demi mengurangi ancaman kepunahan sebagai bentuk dukungan bagi pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan konvensi internasional CITES. Selain karena YCKT adalah Pusat Penyelamatan Satwa dan penangkaran satwa liar paling besar di Jawa, YCKT juga dipilih karena YCKT merupakan NGO yang berada di Indonesia, bergerak dalam lingkup Indonesia, namun memiliki jejaring internasional yang sangat luas dan berhasil untuk menarik berbagai aktor transnasional untuk bekerja sama dalam upaya konservasinya.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Besar harapan peneliti untuk bisa memberikan pengetahuan baru bagi mahasiswa dan mahasiswi yang memiliki ketertarikan dengan dunia konservasi, khususnya terkait konservasi satwa liar di Indonesia melalui perspektif ilmu

Hubungan Internasional. Beserta peran NGO dan pentingnya kerja sama internasional yang berperan dalam isu konservasi sehingga dapat dikaji, diteliti, maupun dijadikan referensi dalam ranah ilmu Hubungan Internasional. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan pentingnya sinergi antar lembaga dalam mengimplementasikan suatu rezim internasional.

1.4. Kajian Literatur

Pada penelitian ini, terdapat beberapa jurnal dan buku yang dijadikan sebagai referensi. Referensi pertama adalah buku "*Biodiplomacy: Genetic Resources and International Relations*" dengan judul artikel "*International Environmental Law and National Interests*" karya Charles Okidi. Referensi kedua adalah "*Non-state Actors in Global Environmental Governance- New Arrangements Beyond the State*" yang ditulis oleh Bas Arts. Sementara referensi terakhir adalah "Implementasi CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) dalam Menangani Perdagangan Kukang Ilegal di Indonesia" oleh Wahyadyatmika Permana Adi.

Pada literatur pertama, Charles Okidi membahas perhatian global yang mulai menekankan pada isu lingkungan akibat permasalahannya yang bersifat lintas batas negara. Menurut Okidi salah satu bukti dari permasalahan lingkungan yang bersifat lintas batas negara adalah pada tahun 1902 ketika Austria dan Italia menginisiasikan perjanjian terkait perlindungan burung bagi pertanian.¹⁸ Kemudian

¹⁸ Okidi Charles Odidi, "International Environmental Law and National Interest," in *Compendium of Judicial Decisions on Matters Related to Environment: INTERNATIONAL Decisions, Volume 1*

setelah itu, banyak negara terinspirasi untuk membuat perjanjian demi perlindungan satwa. Kemudian pada abad ke-19, UNEP menyebutkan bahwa telah ada 35 perjanjian internasional baru yang dibuat oleh negara-negara yang berkaitan dengan isu satwa.¹⁹ CITES termasuk ke dalam 35 perjanjian yang telah dibuat dan masih berjalan hingga saat ini. Charles Okidi juga menjelaskan cara yang dilakukan untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA) seperti *conservation*, *preservation*, dan *sustainable use*.²⁰ *Conservation* berarti mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dengan tujuan menghindari pemborosan SDA, *preservation* merujuk kepada perlindungan SDA yang memiliki keunikan biologis ataupun geologis, termasuk spesies yang terancam punah. Sementara *sustainable use* dapat dipahami sebagai pemeliharaan dan peningkatan SDA melalui pemanfaatan kemampuan yang dimiliki generasi saat ini.

Literatur kedua berbicara tentang peran aktor non-negara dalam *Global Environmental Governance* (GEG) yang mengimplikasikan transisi dari “*government*” menjadi “*governance*” serta meningkatnya peran aktor *private* dan *civil* dalam dunia internasional.²¹ Literatur ini menyediakan kasus-kasus yang melibatkan keterlibatan berbagai tipe aktor non-pemerintah dalam GEG yang memperlihatkan kualitas dan kuantitas kekuatan politik yang berbeda-beda dari berbagai pemangku kepentingan. Dari kasus tersebut kita dapat melihat, berbagai

(Nairobi: UNEP/UNDP Joint Project on Environmental Law and Institutions in Africa, 1998), pp. 19-43, hlm. 34.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 35

²⁰ *Ibid.*, hlm. 19-20

²¹ Bas Arts, “Non-State Actors in Global Environmental Governance: New Arrangements beyond the State,” *New Modes of Governance in the Global System* (2006): 177-200.

macam dominasi aktor non-pemerintah seperti bisnis yang bersifat mengambil keuntungan maupun NGO yang tidak berbasis keuntungan. Peneliti mengakui pentingnya peran aktor non-pemerintah, yang berfokus kepada sistem “*multirule*”, dimana rancangan tata kelola dikarakteristikan oleh 3 indikator yakni kepublikan, inklusifitas, dan delegasi.²²

Literatur terakhir berbicara tentang implementasi CITES untuk satu spesies spesifik Kukang. Dalam artikel ini penulis menganalisis kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional CITES dan menentukan faktor yang menyebabkan perdagangan ilegal kukang di Indonesia. Menurutnya Indonesia telah patuh terhadap CITES namun implementasi domestik masih memiliki banyak keterbatasan. Hal ini ditunjukkan dari masih adanya perdagangan satwa ilegal yang tetap terjadi. Hal tersebut dijelaskan melalui teori kebijakan publik yang berbicara mengenai kurangnya struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya dan disposisi. Dari sudut pandang struktur birokrasi disebutkan bahwa ada beberapa kelemahan yang ditemukan, yaitu mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja otoritas manajemen, otoritas keilmuan, serta pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan aturan CITES tersebut.²³

Sementara dari pandangan komunikasi, untuk mengoptimalkan implementasi aturan CITES diperlukan pula kerja sama dan koordinasi dengan masyarakat. Namun, pemerintah selaku pengelola CITES di Indonesia sepertinya

²² *Ibid.*

²³ Wahyadyatmika Permana Adi, Reni Windiani, dan Nadia Farabi, 2017, Op.cit.

masih sangat fokus pada memperkuat kekuatan dan jaringan diantara lembaga-lembaga formal, seperti BKSDA, Polri, Kejaksaan, Bea Cukai, serta pihak-pihak lainnya sehingga komunikasi dan interaksi dengan masyarakat justru sedikit terabaikan.²⁴ Sehingga banyak masyarakat lokal yang tidak paham tentang hal apa yang harus dilakukan Ketika ia berinteraksi dengan satwa liar. Sementara dari sudut pandang sumber daya, Indonesia memang sudah memiliki pihak pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan penerima kebijakan. Namun masih ada beberapa kendala pelaksanaan CITES seperti kurangnya jumlah personel lapangan, terbatasnya pengetahuan otoritas pengelola CITES maupun masyarakat, serta terbatasnya peralatan yang digunakan.²⁵ Lalu yang terakhir dari sudut pandang disposisi, atau watak dan praktik baik pelaku kebijakan seperti komitmen, kejujuran sifat demokratis. Sifat tersebut mungkin saja sudah tercermin, namun kontrol dan pengawasan terhadap pemangku kepentingan yang terlibat masih lemah sehingga terkadang setiap institusi bergerak sesuai dengan keinginan dan tujuan masing-masing.²⁶

Seluruh artikel di atas memiliki suatu kesamaan yakni menjelaskan bagaimana sebuah norma internasional yaitu norma mengenai perlunya perlindungan satwa liar dan pemeliharaan keanekaragaman hayati yang berusaha diimplementasikan atau di lokalisasi. Artikel pertama berargumen bahwa pentingnya sebuah norma internasional dapat berpengaruh kepada munculnya perjanjian internasional yang menyatukan berbagai negara untuk bersepakat

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

mengenai sebuah isu. Sementara artikel kedua berargumen bahwa peran aktor non-pemerintah merupakan peran yang krusial dalam mengimplementasikan sebuah perjanjian internasional atau tata kelola global. Sedangkan artikel ketiga berargumen secara spesifik kepada implementasi CITES di Indonesia yang masih terbatas, hal ini ditunjukkan oleh maraknya kasus perdagangan satwa Kukang. Berbeda dengan ketiga literatur di atas, penelitian ini mencoba melengkapi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan melihat peran NGO secara lebih spesifik, yakni bagaimana peran YCKT dalam membantu meredam permasalahan yang ada sembari melakukan implementasi CITES yang mengupayakan konservasi satwa liar demi mengurangi angka kepunahan spesies satwa dan dalam rangka pelestarian alam. Ketiga literatur di atas belum memberikan perhatian terhadap lokalisasi sebuah perjanjian internasional yang diimplementasikan secara spesifik oleh aktor non-negara dalam lingkup nasional Indonesia serta posisi dan dampak baik yang telah diberikan dalam konteks sistem perlindungan skala nasional dalam kasus ini di Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini berusaha menunjukkan pentingnya integrasi dan sinergi antar aktor dalam sebuah mekanisme perlindungan yang dilokalisasi dari sebuah perjanjian internasional. Dalam kata lain penelitian ini juga menunjukkan upaya YCKT dalam mengisi keterbatasan peran negara terkait mekanisme konservasi satwa liar di Indonesia, dan terlebih lagi belum ada penelitian mengenai YCKT terutama dalam sudut pandang ilmu hubungan internasional yang telah dilakukan sebelumnya.

1.5. Kerangka Pemikiran

Paradigma Liberalisme akan dijadikan payung besar dalam pola pikir untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dunia hubungan internasional pada dasarnya dipandang oleh liberalisme dengan kaca mata yang lebih optimis. Baik dan kooperatif adalah hal yang dianggap Liberalisme menjadi dasar hakikat dan natur manusia. Individu yang dilahirkan oleh setiap manusia dan hingga negara pada dasarnya baik dan dapat bekerja sama demi menciptakan perdamaian. Kebebasan, kerja sama, perdamaian, dan perkembangan adalah empat fokus utama yang kemudian diperhatikan oleh Liberalisme.²⁷ Bagi Liberalisme, keempat fokus ini membuat kerja sama menjadi satu hal yang sangat penting dalam menciptakan perdamaian dunia dan menyelesaikan berbagai masalah.

Kaum liberalis mengakui bahwa individu memang memiliki kepentingannya masing-masing / *self-interested* dan juga memiliki sifat kompetitif. Namun meski begitu, mereka percaya bahwa setiap individu memiliki kepentingan yang beririsan dengan individu lainnya (*shared interest*). Maka dari itu, mungkin bagi manusia untuk bisa menjalin hubungan dan tindakan aksi sosial yang kolaboratif baik di dalam lingkungan domestik maupun lingkungan internasional yang menjadikan banyak keuntungan bagi berbagai pihak yang terlibat. Kerja sama berbasis kepentingan bersama yang didorong oleh modernisasi memperluas cakupan dan urgensi bagi adanya kerja sama antar pihak. Terlebih lagi fokus dari liberalisme adalah kebahagiaan dan kecukupan pada setiap individu, maka dari itu

²⁷ Georg Sørensen, Jørgen Møller, and Robert H. Jackson, *Introduction to International Relations Theories and Approaches* (Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2022), hlm. 100-102.

liberalisme berusaha menjamin hak-hak dasar manusia yang mendorong perlakuan saling toleransi antar individual maupun negara.

Lebih spesifik lagi, Liberalisme Sosiologis berpendapat bahwa aktor non-pemerintah memiliki peran krusial dalam hubungan internasional. Hal ini dapat dilihat dari terwujudnya hubungan transnasional antar aktor non-negara contohnya hubungan antar individu, kelompok, dan organisasi yang berada di negara yang berbeda dan memiliki peran yang semakin penting dalam Hubungan Internasional.²⁸ Menurut James Rosenau, transnasionalisme adalah “*proses dimana hubungan internasional yang dilakukan oleh negara didukung oleh hubungan antara individu, kelompok dan masyarakat yang memiliki konsekuensi bagi terjadinya sebuah fenomena*”²⁹ Mereka percaya bahwa hubungan antar manusia itu lebih suportif, kooperatif dan mendukung perdamaian jika dibandingkan dengan hubungan antar pemerintah. Dengan intensitas hubungan lintas negara yang meningkat, Karl Deutsch berpendapat bahwa terciptanya *security community* atau sebuah kondisi dimana kelompok dari berbagai individu telah bersatu/terintegrasi dalam artian memiliki rasa kesamaan dan ketergantungan yang memungkinkan penyelesaian konflik tanpa kekerasan.

John Burton sebagai salah satu tokoh liberalisme sosiologis mewujudkan sebuah kerangka bernama *cobweb model* yang berusaha menjelaskan bagaimana sebuah negara bangsa memiliki banyak kelompok orang yang berbeda. Seperti

²⁸ *Ibid.*, hlm. 102-103.

²⁹ *Ibid.*

kelompok agama, kelompok bisnis, kelompok buruh, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya di dalam sebuah negara. Kelompok tersebut memiliki jenis ikatan eksternal dan jenis kepentingan yang berbeda, namun memungkinkan untuk beririsan satu dengan yang lainnya. Juga dimungkinkan bahwa seorang individu adalah bagian dalam kelompok yang berbeda-beda sehingga melalui *cobweb model* kita mendapatkan gambaran dunia yang lebih akurat karena adanya representasi dari pola perilaku manusia yang sebenarnya, tidak hanya representasi entitas resmi negara saja. Model ini menunjukkan bahwa ada hubungan saling menguntungkan antar aktor yang memiliki kepentingan yang beririsan.

Salah satu bentuk aktor non-negara yang memegang peran di dalam sistem internasional adalah organisasi non-pemerintah atau *Non-Governmental Organization* (NGO). Kini, NGO menjadi aktor yang menduduki posisi cukup penting dalam sistem internasional. NGO sendiri memiliki intensi untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya, terutama mereka yang berada dalam posisi marginal. NGO menjadi pihak yang mencoba masuk ke dalam ruang di masyarakat yang masih kurang diperhatikan oleh pemerintah atau mengisi *gap* untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat. Dalam buku *Non-Governmental Organisations and Development* yang ditulis oleh David Lewis dan Nazneen Kanji, terdapat 5 karakteristik yang membuat suatu organisasi menjadi NGO, yakni formal, privat atau terpisah dari pemerintahan negara, tidak mencari keuntungan atau *non-profit distributing*, *self-governing* atau mampu mengatasi dan

mengurus permasalahan internal, dan memiliki aspek *voluntary* dalam menjalankan fungsinya.³⁰

Selanjutnya peneliti akan menggunakan konsep peran NGO. Di dalam buku tersebut, terdapat tiga peran NGO/INGO yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Peran tersebut adalah *implementers*, *catalysts* dan *partners*.³¹ Peran sebagai *implementer* terkait dengan mobilisasi sumber daya untuk memberikan jasa dan barang bagi orang yang membutuhkan.³² dengan kata lain, peran sebagai *implementer* berkaitan erat dengan *service delivery*. Karena peran ini, NGO seringkali terlibat dengan berbagai aktor pemerintahan maupun donor dalam melakukan berbagai tugas dalam krisis kemanusiaan, bencana alam dan berbagai tugas kemanusiaan lainnya. Peran sebagai *catalyst* dapat diinterpretasikan dengan peran NGO sebagai *agent of change* atau agen perubahan. NGO seharusnya mempercepat perubahan yang telah dicita-citakan sesuai visi misi organisasinya. Dalam kata lain, peran ini termasuk kemampuan NGO untuk menginspirasi, memfasilitasi, berkontribusi kepada perubahan pada individu, kelompok, pemerintah, bisnis maupun donor. Termasuk juga peran dalam me-lobi dan advokasi, melakukan dan menyebarkan riset informasi, serta upaya untuk mempengaruhi kebijakan. Kemudian peran sebagai *partner* adalah kemampuan NGO untuk bekerja sama secara multi-sektor. Baik dengan pemerintahan, sektor privat maupun donor dalam program bersama. Bekerja sama juga berarti berbagi

³⁰ David Lewis and Nazneen Kanji, *Non-Governmental Organisations and Development* (Taylor & Francis, 2009), hlm. 10-12.

³¹ *Ibid.*, hlm. 12.

³² *Ibid.*

resiko, dan bahkan berbagi sumber daya. Namun idealnya, hubungan kerja sama ini harus bersifat menguntungkan sesama, efektif, responsif, dan tidak saling bergantung.

Teori dan konsep yang telah dipaparkan dimanfaatkan dalam penelitian ini. Teori liberalisme sosiologis dimanfaatkan untuk melihat bagaimana aktor non-pemerintah dan aktor transnasional termasuk individu, kelompok dan masyarakat lintas batas negara memiliki peran penting. Nilai-nilai mengenai transnasionalisme kemudian diturunkan kepada *Cobweb Model* oleh John Burton yang juga digunakan untuk menganalisis peran NGO oleh Lewis dan Kanji sebagai *implementer*, *catalyst* dan *partner*. Konsep peran digunakan untuk menjelaskan peran YCKT sebagai NGO yang melakukan upaya konservasi. Terlebih lagi *Cobweb Model* secara spesifik digunakan untuk menjelaskan peran sebagai *partner* demi memahami pemetaan pola relasi aktor transnasional dalam kerja sama meredam permasalahan terkait satwa liar.

1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif. Metode ini dipilih karena peneliti ingin menghasilkan pemahaman menyeluruh, deskriptif dan eksploratif mengenai konservasi satwa liar yang dilakukan oleh YCKT. Metode kualitatif fokus dalam melihat bagaimana sebuah isu atau fenomena terjadi, bagaimana proses dan hasil yang diupayakan, serta bagaimana peneliti

menginterpretasikan hal tersebut dalam kehidupan.³³ Atau secara singkat John Creswell membaginya menjadi tahap pengumpulan data, analisis data, serta pemaknaan atau interpretasi data. Menurut Creswell ada empat tipe pengumpulan data yang dapat dilakukan seperti *qualitative documents*, *qualitative observations*, *qualitative video and visual materials*, dan *qualitative interviews*.³⁴ Dalam pembahasan peran YCKT dalam konservasi satwa liar, peneliti akan menjelaskan secara deskriptif bagaimana NGO ini berhasil berkolaborasi secara internasional untuk mengupayakan konservasi satwa Indonesia dan melindunginya dari ancaman kepunahan. Akan digunakan pengumpulan data kualitatif melalui *qualitative documents*, *qualitative interviews*, dan *qualitative video and visual materials*. Maka dari itu peneliti akan menggunakan dokumen tertulis, video dan materi visual, serta melakukan wawancara dalam menganalisis peran YCKT.

1.6.2. Jenis Penelitian

Sesuai dengan metode penelitian kualitatif yang telah dipilih peneliti, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif analitis. Jenis penelitian ini berfokus kepada analisis berbagai data yang telah dikumpulkan, yang kemudian disusun secara sistematis dan deskriptif agar dapat menjelaskan gambaran mengenai sebuah fenomena atau kondisi yang sedang diteliti.³⁵ Fenomena yang sedang diteliti dideskripsikan secara mendalam, maka penelitian

³³ John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc, 2018), hlm. 42.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 47.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 186.

berfokus kepada pembahasan mendalam mengenai peran YCKT dalam melaksanakan konservasi satwa liar di Indonesia.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan menggunakan sumber dari data primer beserta data sekunder. Data primer diambil melalui dokumen resmi pemerintah, *press release*, teks konvensi internasional, undang-undang, teks laporan organisasi internasional, wawancara narasumber, dan lain-lain. Data primer yang terkumpul juga didasari oleh pengalaman peneliti selama berkegiatan bersama dengan YCKT sebagai *volunteer*. Pada tahun 2020, peneliti sempat berkegiatan secara dekat dan berkunjung ke lokasi yayasan dan membantu dalam penggalangan dana yang tersendat sejak hadirnya pandemi Covid-19. Setelah itu pun peneliti masih kerap berkontak dan menjaga hubungan baik dengan yayasan ini. Sehingga berbagai sumber data dari penelitian ini bersumber dari para praktisi konservasi di dalam yayasan maupun praktisi konservasi lepas yang pernah bersinggungan dengan program yang dilakukan oleh yayasan Cikananga. Peneliti melakukan wawancara dengan dua *deputy director* dari yayasan ini dengan *interview guideline* yang dapat dilihat di bagian akhir. Sementara data sekunder bersumber dari studi pustaka melalui buku, jurnal ilmiah, berita, *website*, dan lain-lain agar dapat menjadi penunjang proses penelitian.

1.7. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab utama, diantaranya; Bab I: Berisi pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yang menjadi dasar dari

penelitian. Seperti latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan. Bab II: Perlindungan Satwa Liar di Indonesia. Bab ini membahas isu yang menaungi konservasi satwa liar di Indonesia sebagai salah satu metode perlindungan satwa liar. Bab ini membahas permasalahan dan urgensi yang dihadapi dalam konteks Indonesia. Bab III: Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu sebagai NGO yang menyelamatkan Satwa Liar. Bab ini menjelaskan latar belakang pendirian YCKT, visi-misi, objektif, struktur organisasi, mitra organisasi internasional, donor internasional serta unit kerja dan program yang diimplementasikannya. Bab IV: Peran YCKT dalam Konservasi Satwa Liar di Indonesia. Bab ini menjelaskan peran YCKT dalam upaya konservasi satwa liar yang kelangsungan hidupnya terdampak oleh berbagai ancaman yang dianalisa dengan menggunakan konsep peran NGO oleh Lewis dan Kanji serta *Cobweb Model* oleh John Burton. Bab V: Kesimpulan. Pada bab terakhir, kesimpulan dijadikan penutup dari pembahasan penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian.